

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan baik pemerintah, dunia usaha, pendidikan dan masyarakat lainnya. Untuk itu pemerintah harus terus berinovasi agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan pelaporan keuangan, pemerintah pusat sudah memberikan mandat kepada pemerintah daerah yang ditandai dengan turunnya Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membangun *website* guna meningkatkan transparansi publik. Selain instruksi Presiden pemerintah pusat juga menurunkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang dapat dirujuk pada website resmi Komisi Informasi Republik Indonesia ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)). Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap badan publik untuk mengungkapkan informasi publik secara berkala. Publikasi hasil pengelolaan keuangan daerah secara khusus diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006, laporan keuangan daerah yang telah diaudit wajib dipublikasikan (pasal 302).

Laporan keuangan yang dikeluarkan tiap tahunnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah selama satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menjalankan mandat yang telah diberikan rakyat dan menjalankan sesuai dengan semestinya. Dengan laporan

keuangan yang diterbitkan, diharapkan masyarakat bisa ikut serta mengawasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan daerah dan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis.

*Internet Financial Reporting (IFR)* merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan melalui *website* daerah. *Website* dipilih karena memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah kemudahan akses data oleh masyarakat dengan biaya yang murah. Hal ini akan menjadi daya tarik utama mengapa pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah harus dipublikasikan melalui *website* daerah, dengan kemudahan mengakses data dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat, IFR diyakini dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penerapan IFR juga diyakini akan memberikan dampak yang positif, antara lain: kemudahan mengakses informasi publik, masyarakat memperoleh manfaat perbaikan pelayanan publik, serta mencegah terjadinya praktek penyimpangan dan korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga IFR merupakan suatu hal yang harus segera diimplementasikan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah. Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dalam instruksi ini, kepala daerah dianjurkan menyiapkan menu konten TPAD (Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah) pada masing-masing *website* daerahnya.

Konten transparansi ini memuat data terbaru mengenai ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (Ranperda APBD) dan perubahannya, Peraturan Daerah tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah (Perda APBD) dan perubahannya, ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (LRA-SKPD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA-PPKD), serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disertai opini atas LKPD. Instruksi ini mulai berlaku bulan Mei 2012 dan paling lambat penerapannya pada tanggal 31 Juli 2012.

Ahmad Rofik (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih rendahnya implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pencapaian rata-rata kepatuhan dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang baru mencapai 48,27% untuk tingkat Nasional. Khusus untuk pemerintah daerah tingkat kepatuhan baru mencapai 42,61%. Atau hanya 170 dari 399 kabupaten yang sudah melaporkan.

Dwi Martani dan Debby Fitriyani (2014) dalam penelitiannya menyatakan tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah baru

mencapai 15%. Informasi yang paling sering diungkapkan terkait dengan informasi keuangan dan kinerja Pemerintah daerah masih dalam bentuk berita. Sedangkan untuk pengungkapan informasi keuangan utama dan informasi kinerja yang dalam bentuk anggaran/APBD, laporan keuangan, dan laporan kinerja masih di bawah 10%. Sedangkan pada penelitian menyatakan bahwa informasi yang paling banyak disajikan di *website* pemerintah daerah masih tentang profil daerah, kependudukan, perundangan, dan timeliness sedangkan informasi yang terkait dengan keuangan, pembangunan, pelayanan daerah, tokoh daerah, pariwisata, dan detail kontak Pemdamasih belum menjadiprioritas utama Pemda (Rora Puspita dan Dwi Martani, 2012). Padahal konten yang terkait dengan transparansi keuangan merupakan konten yang penting untuk disajikan. Konten ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan industri. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, melihat terjadinya kesenjangan antara harapan masyarakat yang menginginkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya komitmen menjalankan amanat undang-undang No. 14 Tahun 2008 untuk mengelola dan menyediakan informasi yang berkualitas guna tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukandi sektor swasta.

Penelitian yang dilakukan Laswad *et al.* (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan disektor publik belum banyak diteliti. Pernyataan senada juga diungkapkan Styles dan Tennyson (2007) bahwa hanya ada sedikit penelitian tentang institusi pemerintahan. Hasil dua penelitian menunjukkan bahwa *size*, pendapatan per-kapita, *debt*, dan *financial condition* memiliki hubungan positif dengan pengungkapan laporan keuangan pada *website* pemerintah daerah serta pentingnya untuk segera menerapkan IFR pada *website* Pemda. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil yang diperoleh Verawaty (2012). Verawaty (2012) meneliti pemerintah daerah di Indonesia baik tingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten . Hasil menunjukkan hanya beberapa masyarakat yang mampu mengakses data yang disediakan dalam *e-government*, tetapi angka tersebut tidak signifikan. Mayoritas masyarakat belum menekankan pentingnya akuntabilitas serta tidak adanya perluasan terkait dengan lingkup sistem pelaporan dan teknologi yang digunakan . Ketidaktertarikan masyarakat akan menjadi kekurangan dalam perkembangan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sampel Pemda yang terletak di pulau Sumatera dan Jawa. Pulau Sumatera dan Jawa dipilih karena memiliki jumlah penduduk yang besar jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Data yang diambil dari *website* Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pulau Sumatera memiliki 154 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 50.630.931 jiwa sedangkan pulau Jawa memiliki 112 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk sebanyak 136.610.590. Selain itu

pula Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi di Indonesia dengan tingkat kepadatan sebesar 1055/km<sup>2</sup>(Nopember, 2016). Carvalho *et al.* (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa, Pemda- pemda yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan dan pengungkapan informasi akuntansi yang lebih tinggi. Pemda dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga memiliki jumlah media massa yang lebih banyak dengan tingkat tekanan pers yang semakin besar sehingga akan meningkatkan pengungkapan informasi akuntansi untuk memenuhi permintaan informasi dari pers. Pernyataan ini didukung oleh Lazwad *et al.* (2005), dalam penelitiannya menunjukkan fakta bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Botti *et al.* (2014) dalam penelitiannya terkait dengan efisiensi *corporate governance* dan IFR menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan dapat dengan cara melakukan peningkatan kualitas IFR. Botti *et al.* (2014) mengukur kualitas IFR menggunakan dua proksi indeks IFR yaitu: *IFR Content* dan *IFR Presentation*. IFR konten merupakan informasi yang utama dan umum untuk di sajikan kepada pemangku kepentingan sedangkan *IFR Presentation* merupakan format penyajian IFR yang pada dasarnya berfungsi untuk mendukung penyajian *IFR Content*, *IFR Presentation* diukur menggunakan eksistensi teknologi, kenyamanan pengguna (*convenience*) dan *timeliness*. Pada penelitian yang akan dilakukan, pengukuran

konten IFR juga berdasarkan penyajian konten yang mengacu pada informasi yang utama dan umum dalam hal ini mengacu pada instruksi Mendagri RI Nomor 188-52/1797/SJ tahun 2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .Selain konten, penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan IFR *Presentation* yang diukur dengan teknologi yang digunakan, *timeliness*, dan *web user support* yang pada dasarnya sama dengan *convenience* atau kenyamanan bagi pengguna.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laswad *et al.* (2005) , Styles dan Tennyson (2007), serta Verawaty (2012) yang masih menunjukkan belum tercapainya konsistensi terkait dengan penelitian IFR pada Pemda, dan kesenjangan harapan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang bersih. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap UU KIP no. 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang masih berada dibawah 50% secara nasional. Rendahnya tingkat kepatuhan Pemda dan juga masih adanya *gap* penelitian tentang IFR pada Pemda membuat penelitian ini penting untuk dilakukan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyajian konten pada masing-masing *website* pemerintah daerah?

- 2) Bagaimana penerapan *timeliness* pada masing-masing *website* pemerintah daerah?
- 3) Bagaimana penggunaan *technology used* yang digunakan pada masing-masing Pemerintah daerah?
- 4) Bagaimana penerapan *web usersupport* pada masing-masing *website* pemerintah daerah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian informasi keuangan pemerintah daerah berdasarkan *content*, *timeliness*, *technology used* dan *web user support*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Informasi serta hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- 1) Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan transparansi laporan keuangan agar dapat memperbaiki konten *website* serta dapat mengakomodir hak masyarakat atas transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terkait dengan IFR di kalangan pemerintah daerah.



- 3) Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber bacaan, baik bagi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kajian pembelajaran dan penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan akan diuraikan dalam 3 (tiga) bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini merupakan bab pembuka yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II ini merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, sampel, metode

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV      GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA**

Bab IV menjelaskan tentang hal – hal yang terkait mengenai subyek penelitian, analisis deskriptif masing – masing variabel, analisis kluster, dan pembahasan terkait penelitian ini.

#### **BAB V      METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan mengenai penelitian ini.

